

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF

Nihan Kristiyani¹, Laili Komariyah², Lambang Subagiyo³, Warman⁴

¹Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda,^{2,3,4}Universitas Mulawarman

[1nihan.pldpi@gmail.com](mailto:nihan.pldpi@gmail.com), [2laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id](mailto:laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id),

[3subagiyo@fkip.unmul.ac.id](mailto:subagiyo@fkip.unmul.ac.id), [4warman@fkip.unmul.ac.id](mailto:warman@fkip.unmul.ac.id)

ABSTRACT

This research aims to find out the problems faced by schools related to the implementation of inclusive education. Inclusive education as an educational service system so that all children with special needs are served at the nearest school, in regular classes together with friends of their age. The method in this study uses descriptive. Data were obtained by literature study methods, studying journals and government regulations relevant to this research. The results of this study show that the problems faced by schools in implementing inclusive education include (1) internal problems of children with special needs including physical barriers to mobility, mental, psychological, productivity, socio-economic and obstacles to social function, (2) the awareness of some people and parents who are still not open to accepting the condition of their children with special needs and have an impact on the non-implementation of their educational rights, (3) The next problem of the school, especially from the factor of educators or teachers, is not ready to manage the learning of children with special needs, because they are not graduates of special education. (50 is still low on decent accommodations in schools, such as inclusive resource rooms, children's learning furniture, and other supporting accessibility such as disabled toilets, guiding blocks, wheelchair stairs, and others.

Keywords: *children with special needs, inclusive education, problematics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah sekolah terdekat, di kelas reguler bersama dengan teman seusianya. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif. Data diperoleh dengan metode studi pustaka, mempelajari jurnal dan peraturan pemerintah yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif diantaranya (1) problematika internal anak berkebutuhan khusus meliputi hambatan fisik mobilitas, mental psikologis, produktifitas, sosial ekonomi dan

hambatan fungsi sosial (2) kesadaran sebagian masyarakat maupun orang tua yang masih belum terbuka menerima kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus dan berdampak pada tidak terlaksananya hak pendidikan mereka, (3) problematika selanjutnya dari yaitu sekolah terutama dari factor pendidik atau guru- guru belum siap mengelola pembelajaran anak berkebutuhan khusus, dikarenakan bukan lulusan pendidikan luar biasa. (50 masih rendahnya akomodasi yang layak di sekolah, seperti ruang sumber inklusif, perabot pembelajaran ABK, dan aksesibilitas pendukung lainnya seperti toilet disabilitas, guiding block, tangga kursi roda, dan lainnya.

Kata Kunci: anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif, problematika

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap insan manusia, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan fasilitas yang layak untuk mendukung proses belajar dan berkembang. Fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan fasilitas yang khusus, terdiri dari; fasilitas untuk terapi, fasilitas untuk belajar, dan fasilitas untuk bermain.

Pendidikan yang inklusif diatur dalam kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “pemerintah

pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi”. Hak ini juga dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”. Penerapan pendidikan inklusif berdampak pada perubahan pada perubahan dalam isi (content), pendekatan (approach), struktur (structure), dan strategi (strategy). Penerapan pendidikan inklusif mengcreate lingkungan terdidik agar peserta didik berkebutuhan khusus selalu dapat belajar (study), bermain (play) dan berinteraksi (interact) bersama anak seusianya (Nobertus, dkk, 2023).

Permasalahan sosial yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus diharapkan akan teratasi agar mereka dapat memperoleh hak dan merasa aman. Pendidikan inklusi sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus karena sekolah inklusi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan mereka (Marsianus Meka, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi sekolah khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, permasalahan yang dihadapi oleh sekolah maupun guru dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Harapannya kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut dapat dipetakan sesuai karakteristiknya sehingga ke depan dapat diberikan intervensi yang sesuai.

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas maka penulis menyusun artikel tentang **Problematika Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) bahwa: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian". Pengumpulan data diperoleh dari studi literatur dengan cara membaca dan mempelajari jurnal yang relevan dengan penelitian dan peraturan pemerintah yang terkait.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendidikan inklusi dapat membantu perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam konteks pendidikan inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan pendidikan khusus diajarkan bersama-sama dengan teman sebaya mereka yang perkembangannya normal. Pendekatan ini membawa berbagai manfaat positif bagi anak-anak tersebut. Pertama, melalui pendidikan inklusi, anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang

memiliki perkembangan normal. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar melalui pengamatan dan interaksi sosial dengan teman sebaya yang dapat berperan sebagai role model. Mereka dapat belajar dari teman-teman mereka dan meningkatkan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, dan pengembangan hubungan sosial. Selain itu, pendidikan inklusi juga mendorong pertumbuhan akademik anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Dalam lingkungan inklusif, mereka mendapatkan akses ke kurikulum yang sama dengan teman sebaya mereka. Dengan dukungan dan pengajaran yang tepat, anak-anak tersebut dapat mencapai potensi akademik mereka. Mereka dapat belajar dari metode pengajaran yang beragam dan mendapatkan dukungan tambahan jika diperlukan, seperti pendampingan atau modifikasi dalam penilaian. Selanjutnya, pendidikan inklusi juga berkontribusi pada perkembangan emosional anak-anak. Mereka belajar untuk menerima keberagaman, memahami perbedaan, dan menghargai setiap individu. Ini membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana toleransi, empati,

dan penghargaan terhadap perbedaan dihormati. Anak-anak dengan kebutuhan khusus juga merasa lebih diterima dan diakui oleh teman sebaya mereka, yang dapat meningkatkan harga diri dan kesejahteraan emosional mereka (Andry, 2023).

Indonesia mendeklarasikan secara resmi program “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” di kota Bandung pada tahun 2004. Untuk membangun masyarakat yang inklusif memerangi diskriminasi, menciptakan masyarakat terbuka dan mencapai pendidikan untuk semua maka terciptalah solusi sekolah reguler dengan orientasi inklusif. Sekolah inklusi dapat menekan biaya dan keseluruhan sistem pendidikan kepada mayoritas peserta didik sehingga sekolah inklusi dapat meningkatkan efisiensi, akan tetapi masih banyak ditemukan kesulitan di beberapa kota seperti, tenaga kerja yang memiliki kapabilitas dalam mengajar anak berkebutuhan khusus masih kurang memahami tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan metode untuk menanganinya, minimnya guru pendamping kelas, manajemen sekolah inklusi belum maksimal, masih banyak

siswa di dalam kelas, ketidak siapan sekolah menampung anak berkebutuhan khusus, masih adanya intimidasi anak berkebutuhan khusus oleh teman sekelasnya (Tyas Pratiwi, dkk, 2022).

Selama ini pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena budaya yang masih melekat di masyarakat. Misalnya banyak keluarga yang beranggapan bahwa memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah aib sehingga anak mereka hanya dipingit di dalam rumah tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tidak mengenyam pendidikan yang tentunya berdampak pada psikis si anak dan masa depannya (Maisarah, 2018, dalam Marsianus Meka, 2023).

Anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan perlu dikasihani. Hal inilah yang menjadikan anak berkebutuhan khusus sering dikucilkan dari lingkungan

sekitar. Anak-anak berkebutuhan khusus sering menerima perlakuan yang diskriminatif dari orang lain. Bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Beberapa sekolah regular tidak mau menerima mereka sebagai siswa. Alasannya guru di sekolah tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Terkadang sekolah khusus letaknya jauh dari rumah mereka, sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disediakan berbagai layanan pendidikan atau sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, baik menyangkut system pembelajaran, fasilitas yang mendukung, maupun peran guru yang sangat penting untuk memberikan motivasi dan arahan yang bersifat membangun. Sekolah yang dianggap tepat untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusi (Marsianus Meka, 2023).

Pelaksanaan sekolah inklusi tentunya tidak luput dari berbagai macam permasalahan. Tidak hanya terkait dengan kesiapan guru namun juga siswa, orang tua, sekolah, masyarakat,

pemerintah serta kurangnya sarana prasarana tetapi juga minimnya kerjasama dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, guru menjadi salah satu faktor utama dalam proses pendidikan inklusi. Tetapi jika tidak ada bantuan dari pihak-pihak lain tentunya pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan maksimal, sehingga tidak hanya guru yang ditangani tetapi perlu menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik di dalam sekolah ataupun komunitas di luar sekolah tersebut. Tentunya campur tangan pemerintah turut menentukan pelaksanaan sekolah inklusi tersebut.

Permasalahan tersebut akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain, baik dari permasalahan guru, siswa, sekolah, masyarakat, pemerintah. Pertama, dalam permasalahan guru, guru merasa bahwa kurang memiliki kemampuan dalam menangani ABK. Hal ini disebabkan karena guru kurang memahami tentang ABK dan sekolah inklusi sehingga berdampak pada masalah selanjutnya yaitu menjadi kesulitan tersendiri dalam proses belajar mengajar. Selain itu, latar belakang guru yang tidak sesuai dengan yang

dibutuhkan yaitu dari lulusan pendidikan luar biasa menjadikan beban kerja yang berat bagi guru itu sendiri. Sekolah reguler memiliki guru pembimbing khusus yang ditunjuk langsung oleh sekolah untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus. Sehingga guru pembimbing khusus biasanya merupakan guru mata pelajaran dan guru kelas yang notabnya bukanlah lulusan Pendidikan Luar Biasa, melainkan lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Matematika, Pendidikan Olahraga, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Sains.

Kurangnya guru pendamping kelas yang mumpuni juga menjadi salah satu permasalahan yang ada. Hal tersebut secara tidak langsung memberi dampak pada pemberian penanganan pada siswa ABK yang kurang maksimal, ditambah dengan perbedaan kebutuhan siswa yang berbeda-beda dan memerlukan penanganan yang berbeda serta jumlah ABK yang melebihi kuota dalam tiap kelasnya sehingga berdampak pada kurang lancarnya proses KBM (Tyas Pratiwi ,dkk, 2022).

Beban guru semakin berat, pada saat menerima kenyataan dilapangan bahwa banyak dari orangtua ABK tidak peduli terhadap perkembangan anaknya. Banyak orangtua yang kemudian hanya pasrah sepenuhnya tentang perkembangan anaknya kepada sekolah. Hal ini juga bisa disebabkan karena pemahaman orangtua tentang ABK masih kurang. Permasalahan lain yang muncul yaitu toleransi atau pengertian dari orangtua siswa regular terhadap kebutuhan ABK masih kurang karena banyak dari masyarakat yang masih memandang rendah ABK dan sekolah inklusi sehingga masyarakat kurang memberi dukungan terkait pelaksanaan sekolah inklusi. Hal ini bisa disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat yang terkait pendidikan inklusi dan ABK. Hal tersebut membuat beban guru dan sekolah semakin berat, dimana secara umum, sekolah sendiri belum siap baik dari segi administrasi maupun SDM dalam pelaksanaan pendidikan inklusi disekolahnya, ditambah dengan kurangnya dukungan dan kerjasama dari semua pihak, kurangnya sarana prasarana yang disediakan pemerintah

terkait pelaksanaan sekolah inklusi sehingga pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan maksimal. Permasalahan permasalahan yang muncul sebenarnya dikarenakan baik sekolah, masyarakat dan guru belum sepenuhnya memahami dan mengetahui bagaimana cara menangani ABK pada khususnya. sekolah dan guru juga belum mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah inklusi yang sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan Pemerintah dianggap kurang bisa mensosialisasikan kebijaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan sekolah inklusi atau kebijakan tentang sekolah inklusi sendiri belum jelas dan kurangnya pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah yang bisa meningkatkan kompetensi guru. Guru menganggap bahwa perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap sekolah inklusi kurang baik dari segi kesejahteraan SDM maupun terkait kompetensi SDM.

Anak berkebutuhan khusus memiliki berbagai macam permasalahan sosial misalnya, cenderung rendah diri atau sebaliknya menghargai berlebihan, mudah tersinggung, terkadang agresif, pesimis, sulit mengambil keputusan,

menarik diri dari lingkungan, kecemasan berlebihan, ketidakmampuan dalam hubungan dengan orang lain dan ketidakmampuan mengambil peranan sosial. Masalah-masalah tersebut cenderung akan meningkat apabila terdapat tekanan dari lingkungan sosial, termasuk dengan stigma negatif masyarakat. Sebagian besar orang awam menganggap anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam hal fisik maupun mental, individu yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Stigma tersebut muncul karena budaya yang masih melekat di masyarakat, contohnya banyak keluarga yang beranggapan bahwa memiliki anak yang berkebutuhan khusus akan menjadi aib keluarga, sehingga anak tersebut tidak diperbolehkan keluar rumah dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, bahkan dibiarkan tidak mengenyam pendidikan. Hal ini akan berdampak pada psikis dan masa depan anak.

Soewito (1993 dalam Marsianus meka, 2023), mengatakan permasalahan anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dari empat aspek, yaitu :1) Aspek yang

berasal dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri meliputi (a) hambatan fisik mobilitas, (b) hambatan mental psikologis, (c) hambatan pendidikan,(d) hambatan produktifitas, (e) hambatan sosial ekonomi (f) hambatan fungsi sosial. 2) Aspek dari pihak keluarga meliputi, (a) sikap memberi perlindungan yang berlebihan yang menghambat perkembangan kemampuan optimal, (b) pengetahuan yang rendah, (c) diskriminasi kaarena kurang kesadaran tentang pendidikan bagi anaknya, (d) hal lain seperti malu menampilkan anaknya atau merasa berdosa sehingga terlalu memanjakan. 3) Aspek dari masyarakat, meliputi (a) masyarakat ragu terhadap kemampuan atau potensi anak berkebutuhan khusus (b) bersifat masa bodoh, (c) lemahnya pengelolaan organisasi bidang kecacatan,(d) terbatasnya lapangan anak berkebutuhan khusus. 4) Aspek dari pemerintah dimana undang-undang anak berkebutuhan khusus belum dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, sudah pasti pendidikan inklusi sangat bermanfaat untuk anak berkebutuhan khusus dan masyarakat. Dampak yang

paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Misalnya adanya sikap positif bagi siswa berkelainan yang berkembang dari komunikasi dan interaksi dari pertemanan dan kerja sebaya. Siswa belajar untuk sensitif, memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman dengan perbedaan individual. Selain itu, anak berkelainan belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum. Dan dengan sekolah inklusi, anak terhindar dari dampak negatif dari sekolah segregasi, kecenderungan pendidikannya yang kurang berguna untuk kehidupan nyata, label "cacat" yang memberi stigma pada anak dari sekolah segregasi membuat anak merasa inferior, serta kecilnya kemungkinan untuk saling bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Mereka cenderung membutuhkan dukungan dan motivasi yang mampu mendorong mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya, maka komponen utama yang paling mereka butuhkan di sekolahnya adalah sebuah keramahan, yang menerjemahkan pada mereka

suatu penunjukan kondisi penerimaan terhadap diri mereka. Dalam sekolah inklusi, makna orang tua juga berperan dalam menentukan perencanaan baik dari segi perencanaan kurikulum di sekolah maupun bantuan belajar di rumah (Marsianus Meka, 2023).

Untuk menyadarkan orang tua dan masyarakat maka diperlukan peran sekolah dan lembaga lembaga terkait. Orang tua dan masyarakat perlu diberikan wawasan tentang hak hak setiap anak dalam belajar, termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Amka (2019) menyatakan sikap tersebut orang tua berubah setelah itu mendapatkan sosialisasi dari partai sekolah tentang pendidikan inklusif dan telah memahami prinsipnya keragaman kebutuhan belajar anak. Ini diharapkan untuk berubah pandangan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus, Winarti, 2015 dalam Risalah Ummah, 2022). (Kartika, 2023), secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusif di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bisa, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusif itu

sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak. Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman inklusi dan implikasinya
 - a. Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pemahamannya masih sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah reguler dalam rangka give education right dan kemudahan access education, serta against discrimination.
 - b. Pendidikan inklusif cenderung dipersepsi oleh masyarakat sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
 - c. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proactive dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan complain orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan cemoohan.
2. Kebijakan sekolah
 - a. Meskipun telah

didukung dengan visi dan misi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus, sebagian sudah memiliki guru khusus,

2. Mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.
- b. Kebijakan sekolah yang masih kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.
3. Proses pembelajaran terdiri dari
 - a. Pelaksanaan pembelajaran belum dilakukan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi.
 - b. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kurikulum dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
 - c. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa

berkebutuhan khusus tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. d. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.

4. Kondisi guru a. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang not sensitive and proactive yet to the special needs children. b. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK.
5. Sistem dukungan a. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi-LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas. b. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusif, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan program yang terstruktur mengikuti kelebihan dan kemampuan yang dimiliki anak serta menjunjung tinggi toleransi. Akan tetapi, penerapan pendidikan inklusi di Indonesia dari definisi tersebut masih terbilang kurang karena beberapa faktor. Dimulai dari faktor pendidikannya, kurikulumnya, fasilitasnya, hingga anak berkebutuhan khususnya masih sulit menyesuaikan diri dengan temannya.

Rendahnya mentalitas pendidikan inklusi karena orang tua ragu dan menganggap sekolah tersebut berisi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Maka perlu dibutuhkan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia, misalnya memperbanyak guru pembimbing khusus yang berasal dari lulusan PLB, menunjang sarana prasarana demi keberlangsungan proses pembelajaran. Keberhasilan sekolah inklusi perlu melibatkan banyak pihak, diantaranya: komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orangtua, siswa, tim administratif sekolah, komunitas sekolah

untuk memaksimalkan kinerja guru, dan pemerintah bisa berfokus pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan guru, seperti peningkatan pemahaman kompetensi guru karena guru adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan.

Selama proses penerimaan peserta siswa baru, pihak sekolah melakukan observasi kepada calon siswa dengan menyesuaikan jenis kebutuhan atau gangguan, yaitu kategori ringan dan berdasarkan domisili tempat tinggal anak yang dekat dengan lingkungan sekolah. Pendidikan Inklusif, memperhatikan prinsip pembelajaran yang disesuaikan karakteristik belajar siswa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andry B, A. (2023). PENTINGNYA PENDIDIKAN INKLUSIF: MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG RAMAH BAGI SEMUA SISWA. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 12–19.

<https://doi.org/10.61397/jkpp.v1i1.10>

Kartika Puspendari, Yunita Sinaga, 2023. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA, *Jurnal Ilmiah Publika*, DOI:

<https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8269>

Meka, M., Dhoka, F. A. ., Poang, F. ., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. . (2023). PENDIDIKAN INKLUSI SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN SOSIAL BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2109>

Tyas Pratiwi, L., Nur Maghfiroh, M., Septa Andika, D., Nur Marcela, I., & Faza Afifah, A. (2022). PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA . *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata* , 3(2), 314-318. <https://doi.org/10.51494/jpdf.v3i2.704>

Ummah, R., Nelita Suryani Tri Safara, Aisyah Rahma Ummi Kurnilasar, Hana Ribthi Dimas'udah, & Virginia Arsariris Medy Sukma. (2023). Tantangan Atau Hambatan Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 111–118. Retrieved from

<https://journal.unusida.ac.id/index.php/jmi/article/view/1115>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional